

KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
DIREKTORAT JENDERAL PLANOLOGI KEHUTANAN DAN TATA LINGKUNGAN



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)
BPKH WILAYAH XXI PALANGKA RAYA
TAHUN 2021

Palangka Raya, 12 Januari 2022

KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) disusun sebagai evaluasi terhadap hasil-hasil kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XXI Palangka Raya selama tahun 2021 (Januari s.d. Desember 2021) sebagai penyelenggara program pemerintah di bidang kehutanan khususnya bidang keplanologian yang berfokus kepada kinerja dan secara terpadu mempertanggungjawabkan keberhasilan maupun kegagalan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta misi organisasi.

Dengan berakhirnya pelaksanaan DIPA kegiatan tahun 2021, BPKH Wilayah XXI Palangka Raya telah menyelesaikan kegiatannya dan merupakan implementasi tahun kedua dari Rencana Strategis (Renstra) Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XXI Palangka Raya Tahun 2020-2024. Renstra ini berpedoman pada Rencana Strategis Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Tahun 2020-2024 yang telah disempurnakan yang digunakan sebagai acuan bagi pelaksanaan kegiatan dalam upaya memenuhi tujuan utama Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan.

Kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan laporan ini, kami ucapkan terima kasih. Semoga laporan ini bermanfaat.



Palangka Raya, Januari 2022

Kepala Balai,

Doni Sri Putra, S.Hut., M.E.

NIP. 19740909 199903 1 007

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi	1
C. Sumber Daya Manusia.....	4
D. Permasalahan Yang Sedang Dihadapi.....	6
II. PERENCANAAN KINERJA	7
A. Rencana Strategis (Renstra) 2020-2024	7
B. Rencana Kerja (Renja) Tahun 2021.....	9
C. Rencana Kerja dan Anggaran (RKA)	11
D. Perjanjian Kinerja.....	13
E. Reviu atas dokumen perencanaan.....	16
III. AKUNTABILITAS KINERJA	18
A. Capaian Kinerja Organisasi	18
B. Realisasi Anggaran	25
IV. PENUTUP	26

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

BPKH Wilayah XXI Palangka Raya yang berdasarkan Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor: P.6/Menlhk/Setjen/OTL.0/1/2016 tanggal 29 Januari 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pemantapan Kawasan Hutan, BPKH merupakan Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan.

BPKH Wilayah XXI Palangka Raya merupakan salah satu Unit Pelaksana Teknis dipimpin oleh seorang Kepala Balai Pejabat Administrator (Eselon IIIa) dibantu oleh 3 (tiga) Pejabat Pengawas (Eselon IVa) yakni Kepala Sub Bagian Tata Usaha, Kepala Seksi Pemolaan Kawasan Hutan dan Kepala Seksi Informasi Sumber Daya Hutan dan Lingkungan serta Kelompok Jabatan Fungsional.

B. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

BPKH Wilayah XXI Palangka Raya mempunyai tugas pokok yaitu melaksanakan pengukuhan kawasan hutan, penyiapan bahan perencanaan kehutanan wilayah, penyiapan data perubahan fungsi serta perubahan status/peruntukan kawasan hutan, penyajian data dan informasi pemanfaatan kawasan hutan, penilaian penggunaan kawasan hutan dan penyajian data informasi sumber daya alam. Selanjutnya untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana tersebut di atas, BPKH Wilayah XXI Palangka Raya menyelenggarakan fungsinya sebagai berikut:

- a. Pelaksanaan identifikasi dan inventarisasi potensi lokasi yang akan ditunjuk sebagai kawasan hutan;
- b. Pelaksanaan penataan batas dan pemetaan kawasan hutan;
- c. Pelaksanaan penilaian perubahan status dan fungsi kawasan hutan;
- d. Pelaksanaan penilaian penggunaan kawasan hutan;
- e. Penilaian teknis tata batas areal pemanfaatan hutan, penggunaan kawasan hutan dan perubahan status/peruntukan kawasan hutan;
- f. Pelaksanaan inventarisasi hutan skala Nasional di wilayah;

- g. Pengumpulan dan pengolahan data Informasi Sumber Daya Hutan (SDH) dan Sumber Daya Alam untuk Neraca Sumber Daya Hutan (NSDH) dan Neraca Sumber Daya Alam;
- h. Pengelolaan sistem informasi geografis dan perpetaan kehutanan dan Tata Lingkungan;
- i. Penyiapan dan penyajian data dan informasi perencanaan kehutanan, pengukuhan kawasan hutan, penatagunaan kawasan hutan, wilayah pengelolaan hutan, pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan serta tata lingkungan;
- j. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Balai.

Di samping TUPOKSI yang telah ditetapkan, Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XXI berkedudukan di Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah.

Penjabaran uraian tugas pada Sub Bagian Tata Usaha, Seksi Pemolaan Kawasan Hutan dan Seksi Informasi Sumber Daya Hutan dan Lingkungan sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.6/Menlhk/Setjen/OTL.0/1/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pemantapan Kawasan Hutan.

Tugas pada masing-masing seksi/sub bagian sebagai berikut:

- a. Subbagian Tata Usaha** mempunyai tugas melakukan urusan tata persuratan, kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan rumah tangga, koordinasi penyusunan perencanaan program dan anggaran, evaluasi dan pelaporan.
- b. Seksi Pemolaan Kawasan Hutan** mempunyai tugas penyiapan bahan identifikasi dan inventarisasi potensi lokasi yang akan ditunjuk sebagai kawasan hutan; penataan batas dan pemetaan kawasan hutan; penilaian perubahan status dan fungsi kawasan hutan; penilaian teknis tata batas areal pemanfaatan hutan, penggunaan kawasan hutan dan perubahan status/peruntukan kawasan hutan.
- c. Seksi Informasi Sumberdaya Hutan dan Lingkungan** mempunyai tugas pelaksanaan penyiapan bahan penilaian penggunaan kawasan hutan; pelaksanaan inventarisasi hutan skala Nasional di wilayah; penyusunan dan penyajian data informasi Sumber Daya Hutan (SDH) dan Sumber Daya Alam

(SDA); pengelolaan sistem informasi geografis kehutanan dan tata lingkungan; pengukuhan kawasan hutan, pengukuhan kawasan hutan, penatagunaan kawasan hutan, wilayah pengelolaan hutan, pemanfaatan hutan dan penggunaan kawasan hutan serta tata lingkungan.

- d. Kelompok Jabatan Fungsional** mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.



Gambar : Struktur Organisasi BPKH Wilayah XXI Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.6/Menlhk/Setjen/OTL.0/1/2016 tanggal 29 Januari 2016.

C. Sumber Daya Manusia

Deskripsi Sumber Daya Manusia pada BPKH Wilayah XXI Palangka Raya tahun 2021 berjumlah 58 orang terdiri dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebanyak 32 orang dan Pegawai Tidak Tetap (PTT) sebanyak 26 orang. Pengalokasian pegawai pada masing-masing Sub Bagian/Seksi sebagai berikut :

Tabel. Deskripsi Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Golongan s/d 31 Desember 2021

No	Uraian	2021				
		a	B	c	d	Jml
1	2	23	24	25	26	27
1	Golongan IV	3	1	-	-	4
2	Golongan III	12	3	5	5	25
3	Golongan II	-	1	1	1	3
4	Golongan I	-	-	-	-	-
Jumlah						32

Tabel. Deskripsi Pegawai Negeri Sipil Menurut Jenis Kelamin s/d 31 Desember 2021

No	Uraian	2021		
		LK	PR	JML
1	2	15	16	17
1.	Golongan IV	3	1	4
2.	Golongan III	21	4	25
3.	Golongan II	1	2	3
4.	Golongan I	-	-	-
Jumlah				32

Keterangan : LK = Laki-laki PR = Perempuan

Tabel. Deskripsi Pegawai Negeri Sipil Menurut Tingkat Pendidikan s/d 31 Desember 2021

No	Uraian	2021		
		KHL	NK	JML
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>15</i>	<i>16</i>	<i>17</i>
1.	Pasca Sarjana	8	1	9
2.	Sarjana (S1)	15	4	19
3.	Diploma III	0	1	1
4.	Diploma I	-	-	-
5.	SLTA	2	1	3
6.	SLTP	-	-	-
7.	SD	-	-	-
Jumlah				32

Keterangan : KHL = Kehutanan & Lingkungan NK = Non Kehutanan

Tabel. Deskripsi Pegawai Tidak Tetap (PTT) Menurut Tingkat Pendidikan s/d 31 Desember 2021

No	Uraian	2021		
		KH	NK	JML
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>15</i>	<i>16</i>	<i>17</i>
1.	Pasca Sarjana	-	-	-
2.	Sarjana (S1)	4	5	9
3.	Diploma III	2	-	2
4.	Diploma I	-	-	-
5.	SLTA/ SMK Kehutanan	5	9	14
6.	SLTP	-	1	1
7.	SD	-	-	-
Jumlah				26

Keterangan : KH = Kehutanan NK = Non Kehutanan

D. Permasalahan Yang dihadapi

Wilayah kerja BPKH Wilayah XXI Palangka Raya meliputi 1 (satu) Provinsi yaitu Provinsi Kalimantan Tengah. Luas wilayah Kalimantan Tengah berdasarkan Peraturan Daerah No. 05 Tahun 2015 tanggal 3 Agustus 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah 2015 – 2035 dari luas wilayah administrasi Provinsi Kalimantan Tengah adalah 15.514.811,71 ha dan selanjutnya mengacu pada Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: SK.529/Kpts-II/2012 tanggal 25 September 2012 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Pertanian Nomor 759/Kpts/Um/10/1982 tentang Penunjukan Areal Hutan di Wilayah Provinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah dan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : SK.6627/MENLHK-PKTL/KUH/PLA.2/2021 tentang Peta perkembangan pengukuhan kawasan hutan Provinsi Kalimantan Tengah luas kawasan hutan adalah 11.931.843,60 ha atau 77,62 % dari luas daratan, dan luas daratan Provinsi Kalimantan Tengah adalah 15.372.910,92 ha.

Untuk menjalankan tugas pokok dan fungsi BPKH pada areal yang sangat luas tersebut, jumlah SDM yang belum memadai baik tenaga administrasi maupun teknis serta juga belum di dukung dengan sarana prasarana yang cukup dalam mendukung pelaksanaan tugas.

II. PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis (Renstra) 2020-2024

Dalam rangka mendukung dan berkontribusi dalam Pembangunan Nasional khususnya bidang lingkungan hidup dan kehutanan kurun waktu Tahun 2020-2024, BPKH Wilayah XXI Palangka Raya mempunyai peran strategis dalam mewujudkan pemantapan kawasan hutan di wilayah Provinsi Kalimantan Tengah yang mengacu dan berpedoman pada Rencana Strategis Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Tahun 2020-2024.

Renstra Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Tahun 2020-2024 yang merupakan kumpulan program intervensi yang harus menjadi bagian dari seluruh kegiatan teknis di lingkup Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan. Program intervensi yang akan dikembangkan meliputi:

1. Intervensi Kebijakan

Kebijakan/regulasi/peraturan/NSPK yang harus dilaksanakan dalam rangka pencapaian sasaran strategis BPKH Wilayah XXI Palangka Raya Tahun 2020-2024.

2. Intervensi Sumber Daya Manusia

Program pengembangan SDM (kualitas dan kuantitas) yang dibutuhkan dalam rangka pencapaian sasaran strategis BPKH Wilayah XXI Palangka Raya Tahun 2020-2024.

3. Intervensi Teknologi

Teknologi yang diperlukan untuk mempermudah atau sebagai syarat pencapaian sasaran strategis BPKH Wilayah XXI Palangka Raya Tahun 2020-2024.

4. Intervensi Anggaran

Anggaran yang dibutuhkan dalam rangka pencapaian sasaran strategis BPKH Wilayah XXI Palangka Raya Tahun 2020-2024.

5. Intervensi Kemitraan

Program pelibatan para pihak dan pengembangan kemitraan para pihak untuk mendukung pencapaian sasaran strategis BPKH Wilayah XXI Palangka Raya Tahun 2020-2024.

Renstra BPKH Wilayah XXI Palangka Raya Tahun 2020-2024 yang mengacu pada Renstra Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Tahun 2020-2024 yang mana sebagai alat dalam penetapan target dan pemantauan implementasi kegiatan. Rencana strategis ini merupakan gambaran secara garis besar dari kegiatan BPKH Wilayah XXI Palangka Raya yang dijabarkan lebih lanjut ke dalam kegiatan selama 5 (lima) tahun. Dengan demikian rencana strategis ini menjadi acuan untuk pelaksanaan tugas dan fungsi BPKH Wilayah XXI Palangka Raya.

Dengan tersusunnya Rencana Strategis BPKH Wilayah XXI Palangka Raya ini, diharapkan pembangunan di bidang planologi kehutanan dan tata lingkungan selama 5 (lima) tahun dapat lebih terarah yang pada akhirnya pemantapan kawasan hutan di Provinsi Kalimantan Tengah dapat terwujud pengelolaan hutan yang lestari dan berkelanjutan.

Untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis kegiatan Program Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Tahun 2021, disajikan pada Tabel 1 berikut:

Tabel 1. Rencana Strategis (Renstra) BPKH Wilayah XXI Palangka Raya

Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Target					Jumlah
				2020	2021	2022	2023	2024	
Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan									
	Terselesaikannya penetapan seluruh kawasan hutan	Seluruh kawasan hutan ditetapkan sebagai kawasan hutan (penetapan kawasan hutan 100%)	Hektar	-	-	-	-	-	-
		Panjang Batas Kawasan Hutan yang Telah Diselesaikan Hak-hak Pihak Ketiga	Km	1.440,5	5.778,03	5.139,20	-	-	12.357,73
		Dokumen Pengendalian Pemantapan Kawasan Hutan di Wilayah Kerja BPKH	Dokumen	-	-	-	-	-	-

		Kawasan hutan yang dilepaskan untuk TORA	Hektar	13.000	104.971	105.073	106.521	106.521	436.086
	Terselesaikanny a pelepasan kawasan hutan untuk TORA	Dokumen hasil inventarisasi, verifikasi dan BATB obyek TORA dalam kawasan hutan di wilayah kerja BPKH	Provinsi	1	1	1	1	1	1
Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan									
	Tersedia dan termutakhirkan ya data dan informasi SDH Nasional dan KPH	Data dan informasi sumber daya hutan hasil inventarisasi hutan nasional di wilayah kerja BPKH	Klaster	10	10	10	10	10	50
		Data dan informasi pemantauan SDH di wilayah kerja BPKH	Dokumen	1	1	1	1	1	5

B. Rencana Kinerja Tahun 2021

Sesuai dengan rencana kerja BPKH Wilayah XXI Palangka Raya tahun anggaran 2021 diusulkan beberapa kegiatan dengan anggaran sebesar **Rp. 30.750.063.000,-** (*Tiga Puluh Milyar Tujuh Ratus Lima Puluh Juta Enam Puluh Tiga Ribu Rupiah*) sesuai dengan pengesahan DIPA (APBN-P) Nomor : SP DIPA-029.06.2.145160/2021 tanggal 23 Desember 2020. Namun dengan adanya perkembangan situasi tahun 2021 yaitu dengan adanya pandemi COVID 19 yang melanda dunia dan Indonesia maka anggaran yang semula direncanakan mengalami revisi selama 2 kali. Revisi tersebut dimaksudkan untuk mengatasi dampak dari pandemi sehingga ada beberapa kegiatan yang ditambahkan pada bulan April dan pengurangan bulan Mei tahun anggaran 2021.

Adapun rincian kegiatan dan anggaran Rencana Kerja 2021 sebagaimana tersebut pada Tabel 2. berikut ini.

Tabel 2. Revisi Kegiatan dan Anggaran BPKH Wilayah XXI Palangka Raya Tahun 2021

Program : Program Kualitas Lingkungan Hidup
Kegiatan : Pencegahan Dampak Lingkungan

MATRIK PERUBAHAN (SEBELUM - SESUDAH)
BPKH WILAYAH XXI

Sebelum			Sesudah		
Kegiatan	Volume	Anggaran	Kegiatan	Volume	Anggaran
5436.007 Dokumen Hasil Verifikasi Lapangan dengan Indeks Jasa Lingkungan Tingkat Tinggi Secara Partisipatif (PEN)	1 Layanan	1.667.000,000	5436.007 Dokumen Hasil Verifikasi Lapangan dengan Indeks Jasa Lingkungan Tingkat Tinggi Secara Partisipatif (PEN)	1 Layanan	1.167.000,000
5433.002 Panjang Batas Kawasan Hutan yang Telah Diselesaikan	1 Rekomendasi Kebijakan	21.811.000,000	5433.002 Panjang Batas Kawasan Hutan yang Telah Diselesaikan	1 Rekomendasi Kebijakan	2.401.060,000
			5433.007 Panjang Batas Kawasan Hutan yang Telah Diselesaikan (PEN) - Food Estate - BCLS/Keremhan (48,00 Km) - Batas Luar (883,18 Km) - Batas Fungsi (1.546,99 Km) - Dukungan Manajemen untuk Ketahanan Pangan Daerah	1 Rekomendasi Kebijakan	18.067.200,000 249.994,000 7.440.993,000 7.292.874,000 3.333.333,000
			5433.008 Panjang Batas Kawasan Hutan yang Telah Diselesaikan (PEN) - Reguler	1 Rekomendasi Kebijakan	1.342.740,000
			5433.008 Penataan Batas Kawasan Hutan untuk Penyelesaian TORA (PEN)	1 Rekomendasi Kebijakan	5.139.294,000
5434.002 Data dan Informasi Sumber Daya Hutan di Wilayah Kerja BPKH	5 Layanan	341.082,000	5434.002 Data dan Informasi Sumber Daya Hutan di Wilayah Kerja BPKH	5 Layanan	350.965,000
5434.003 Data dan Informasi Pemantauan SDH di Wilayah Kerja BPKH	1 Layanan	46.713,000	5434.003 Data dan Informasi Pemantauan SDH di Wilayah Kerja BPKH	1 Layanan	46.713,000
			5434.005 Hasil Verifikasi PNBK Penggunaan Kawasan Hutan	19 Lokasi	503.396,000
5432.001 Layanan Perkantoran	1 Layanan	5.339.268,000	5432.001 Layanan Perkantoran	1 Layanan	5.339.268,000
5432.970 Layanan Umum	1 Layanan	530.000,000	5432.970 Layanan Umum	1 Layanan	530.000,000
5432.EAD Layanan Sarana Internal	203 Unit	1.015.000,000	5432.EAD Layanan Sarana Internal	203 Unit	1.015.000,000
Jumlah		30.750.063,000	Jumlah		36.402.636,000

3

**MATRIK PERUBAHAN (SEBELUM - SESUDAH)
BPKH WILAYAH XXI**

Sebelum			Sesudah		
Kegiatan	Volume	Anggaran	Kegiatan	Volume	Anggaran
5436.007 Dokumen Hasil Verifikasi Lapangan dengan Indeks Jasa Lingkungan Tingkat Tinggi Secara Partisipatif (PEN)	1 Layanan	1,667,000,000	5436.007 Dokumen Hasil Verifikasi Lapangan dengan Indeks Jasa Lingkungan Tingkat Tinggi Secara Partisipatif (PEN)	1 Layanan	1,167,000,000
5433.002 Panjang Batas Kawasan Hutan yang Telah Diselesaikan	1 Rekomendasi Kebijakan	2,401,060,000	5433.002 Panjang Batas Kawasan Hutan yang Telah Diselesaikan	1 Rekomendasi Kebijakan	2,401,060,000
5433.007 Panjang Batas Kawasan Hutan yang Telah Diselesaikan (PEN) - Food Estate - Pelepasan Kawasan Hutan EX PG (293,22 Km) - BCLS/Kemenhan (511,29 Km) - Cadangan (1.526 Km) - Dukungan Manajemen untuk Ketahanan Pangan Daerah	1 Rekomendasi Kebijakan	18,067,200,000	5433.007 Panjang Batas Kawasan Hutan yang Telah Diselesaikan (PEN) - Food Estate - BCLS/Kemenhan (48,00 Km) - Batas Luar (883,18 Km) - Batas Fungsi (1.546,99 Km) - Dukungan Manajemen untuk Ketahanan Pangan Daerah	1 Rekomendasi Kebijakan	18,067,200,000
		1,553,500,000			249,994,000
		3,321,500,000			7,440,993,000
		9,858,867,000			7,292,874,000
		3,333,333,000			3,333,333,000
5433.008 Panjang Batas Kawasan Hutan yang Telah Diselesaikan (PEN) - Reguler	1 Rekomendasi Kebijakan	1,342,740,000	5433.008 Panjang Batas Kawasan Hutan yang Telah Diselesaikan (PEN) - Reguler	1 Rekomendasi Kebijakan	1,342,740,000
5433.008 Penataan Batas Kawasan Hutan untuk Penyelesaian TORA (PEN)	1 Rekomendasi Kebijakan	5,139,294,000	5433.008 Penataan Batas Kawasan Hutan untuk Penyelesaian TORA (PEN)	1 Rekomendasi Kebijakan	5,139,294,000
5434.002 Data dan Informasi Sumber Daya Hutan di Wilayah Kerja BPKH	5 Layanan	350,965,000	5434.002 Data dan Informasi Sumber Daya Hutan di Wilayah Kerja BPKH	5 Layanan	350,965,000
5434.003 Data dan Informasi Pemantauan SDH di Wilayah Kerja BPKH	1 Layanan	46,713,000	5434.003 Data dan Informasi Pemantauan SDH di Wilayah Kerja BPKH	1 Layanan	46,713,000
5434.005 Hasil Verifikasi PNBK Penggunaan Kawasan Hutan	19 Lokasi	503,396,000	5434.005 Hasil Verifikasi PNBK Penggunaan Kawasan Hutan	19 Lokasi	503,396,000
5432.001 Layanan Perkantoran	1 Layanan	5,339,268,000	5432.001 Layanan Perkantoran	1 Layanan	5,339,268,000
5432.970 Layanan Umum	1 Layanan	530,000,000	5432.970 Layanan Umum	1 Layanan	410,390,000
5432.EAD Layanan Sarana Internal	203 Unit	1,015,000,000	5432.EAD Layanan Sarana Internal	203 Unit	1,015,000,000
Jumlah		36,402,636,000	Jumlah		35,783,026,000

Hasil dari Perubahan tersebut adalah anggaran BPKH Wilayah XXI Palangka Raya menjadi sebesar **Rp. 35.783.026.000,-** (*Tiga Puluh Lima Milyar Tujuh Ratus Delapan Puluh Tiga Juta Dua Puluh Enam Ribu Rupiah*).

C. Rencana Kerja dan Anggaran (RKA)

Tabel 3. Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Anggaran BPKH Wilayah XXI Palangka Raya Tahun 2021

Program : Kualitas Lingkungan Hidup
Kegiatan : Pencegahan Dampak Lingkungan

No.	Output	Sub Output	Komponen	Vol	Satuan	Jumlah Biaya
	Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan	1. Panjang Batas kawasan Hutan yang telah diselesaikan Hak-hak pihak ketiga	Penataan Batas Kawasan Hutan	1	Kebijakan Rekomendasi	26.950.294.000

	Pencegahan Dampak Lingkungan	Data dan informasi	Dokumen hasil verifikasi lapangan kawasan dengan IJLT secara partisipatif	1	Dokumen	1.167.000.000
	Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan	Data dan Informasi Sumber daya hutan hasil inventarisasi Hutan Nasional di wilayah kerja BPKH	Inventarisasi sumber daya hutan	6	Klaster	397.678.000,-
	Perencanaan, Penggunaan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan	Hasil verifikasi PNBK Penggunaan Kawasan Hutan	Verifikasi PNBK Penggunaan Kawasan Hutan	21	Lokasi	503.396.000,-
	Dukungan manajemen dan Pelaksanaan Teknis Lainnya Sekretariat Ditjen PKTL	Layanan Dukungan Manajemen Satker	1. Penyusunan rencana program dan Penyusunan rencana anggaran	1	Keg	29.020.000,-
			2. Pelaksanaan dan Pemantauan Evaluasi	1	Keg	9.400.000,-
			3. Pengelolaan keuangan dan perbendaharaan	1	Keg	21.000.000,-
			4. Pengelolaan Kepegawaian	1	Keg	85.335.000,-
			5. Pelayanan Umum, Pelayanan Rumah Tangga dan Perlengkapan	1	Keg	265.635.000-
	Layanan Perkantoran	Operasional perkantoran	1. Pembayaran gaji dan tunjangan	12	Bulan	3.469.837.000,-
			2. Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran	12	Bulan	1.869.431.000-

	Layanan Sarana Internal	Layanan Sarana Internal	1. Pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi	54	Unit	798.250.000
			2. Pengadaan Peralatan fasilitas perkantoran	149	Unit	216.750.000

D. Perjanjian Kinerja

Kode	Kegiatan / KRO / RO	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
5436	Pencegahan dampak lingkungan	Dokumen hasil verifikasi lapangan kawasan dengan indeks jasa lingkungan tinggi secara partisipatif di wilayah kerja BPKH	
5436.QMA	Data dan informasi publik	Penyediaan data dan informasi geospasial kawasan dengan indeks jasa lingkungan tinggi terlayani	1 Layanan
5436.QMA.007	Dokumen hasil verifikasi lapangan kawasan dengan indeks jasa lingkungan tinggi secara partisipatif di wilayah BPKH (PEN)	Penyediaan data dan informasi hasil verifikasi lapangan kawasan dengan indeks jasa lingkungan tinggi secara partisipatif di wilayah kerja BPKH terlayani (PEN)	1 Layanan
5433	Penguatan dan Penatagunaan Kawasan Hutan	Panjang batas kawasan hutan yang telah diselesaikan hak-hak pihak ketiga;	

		Dokumen hasil inventarisasi, verifikasi dan BATB obyek TORA dalam kawasan hutan di wilayah kerja BPKH	
5433.PBV	Kebijakan bidang kehutanan	01 Rekomendasi kebijakan atas pelaksanaan inventarisasi, verifikasi dan penataan batas obyek TORA dalam kawasan hutan di wilayah kerja BPKH diterbitkan; 02 Rekomendasi kebijakan atas pelaksanaan penataan batas kawasan hutan diterbitkan	4 Rekomendasi kebijakan
5433.PBV.002	Panjang batas kawasan hutan yang telah diselesaikan	Rekomendasai kebijakan atas pelaksanaan penataan batas kawasan hutan diterbitkan	1 Rekomendasi kebijakan
5433.PBV.007	Panjang batas kawasan hutan yang telah diselesaikan (PEN)	Rekomendasi kebijakan atas pelaksanaan penataan batas kawasan hutan diterbitkan / ketahanan pangan (PEN)	Rekomendasi kebijakan
5433.PBV.008	Panjang batas kawasan hutan yang telah diselesaikan (PEN)	Rekomendasai kebijakan atas pelaksanaan penataan batas kawasan hutan diterbitkan (PEN)	1 Rekomendasi kebijakan
5433.PBV.009	Inventarisasi, verifikasi dan BATB obyek TORA dalam kawasan hutan	Rekomendasi kebijakan atas pelaksanaan Inventarisasi, verifikasi dan	1 Rekomendasi kebijakan

	(PEN)	penataan batas obyek TORA dalam kawasan hutan di wilayah kerja BPKH diterbitkan (PEN)	
5434	Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan	Data dan informasi sumber daya hutan hasil inventarisasi hutan nasional di wilayah kerja BPKH; Data dan informasi pemantauan SDH di wilayah kerja BPKH.	
5434.BMA	Data dan informasi publik	Penyediaan informasi dan dokumentasi pengukuhan dan penatagunaan kawasan hutan terlayani	6 Layanan
5434.BMA.002	Data dan informasi sumber daya hutan di wilayah kerja BPKH	Penyediaan data dan informasi sumber daya hutan di wilayah kerja BPKH terlayani	5 Layanan
5434.BMA.003	Data dan informasi pemantauan SDH di wilayah kerja BPKH	Penyediaan data dan informasi pemantauan SDH di wilayah kerja BPKH terlayani	1 Layanan
5435	Perencanaan kawasan hutan	Hasil Verifikasi PNPB penggunaan kawasan hutan di wilayah kerja BPKH	
5435.BAC	Pelayanan publik kepada badan usaha	Hasil Verifikasi PNPB penggunaan kawasan hutan di wilayah kerja BPKH	19 Badan usaha
5435.BAC.001	Hasil Verifikasi PNPB	Pelaksanaan Verifikasi PNPB	19 Badan

	Penggunaan Kawasan Hutan di wilayah kerja BPKH	Penggunaan kawasan hutan di wilayah kerja BPKH terlaksana	usaha
5432	Dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan	01 Nilai Sakip Ditjen PKTL; 02 Level Maturitas SPIP Ditjen PKTL; 03 Laporan keuangan Ditjen PKTL yang tertib dan akuntabel	
5432.EAA	Layanan Perkantoran	Layanan perkantoran terlaksana	1 Layanan
5432.EAA.001	Layanan Perkantoran	Layanan perkantoran terlaksana	1 Layanan
5432.EAC	Layanan Umum	Layanan dukungan manajemen	1 Layanan
5432.EAC.970	Layanan dukungan manajemen satker	Layanan dukungan manajemen satker terlaksana	1 Layanan
5432.EAD	Layanan sarana internal	Layanan sarana internal terlaksana	203 Unit
5432.EAD.001	Layanan Sarana Internal	Layanan saran internal terlaksana	203 Unit

E. Reviu atas Dokumen Perencanaan

Kegiatan reviu dilakukan bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas bahwa dokumen/laporan yang disajikan telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai dan disajikan sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh Pemerintah, dengan prioritas; antara lain yaitu Reviu Dokumen Perencanaan dan Anggaran.

Dokumen perencanaan kinerja pada Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XXI Palangka Raya disusun sudah melalui perencanaan matang yang sudah

disesuaikan dengan kebutuhan Organisasi dan Tujuan dari Ditjen Planologi dan Tata Lingkungan.

Kegiatan yang direncanakan meliputi semua tugas pokok dari BPKH Wilayah XXI Palangka Raya yang bertujuan untuk pemantapan kawasan hutan di wilayah Kalimantan Tengah. Kegiatan juga disusun sudah mempertimbangkan kemampuan dan jumlah SDM yang ada pada BPKH Wilayah XXI Palangka Raya sehingga dengan kinerja yang optimal pada akhir tahun anggaran 2021 akan dicapai sasaran fisik sebesar 100 % baik kualitas maupun kuantitasnya.

Diharapkan dengan peran satgas SPIP maka kegiatan yang direncanakan akan dapat terlaksana dengan lancar.

III. AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

Hasil capaian kinerja BPKH Wilayah XXI Palangka Raya Tahun 2021 melalui kegiatan DIPA Tahun 2021 untuk program Planologi dan Tata Lingkungan dengan kegiatan Pemantapan Kawasan Hutan yang terdiri dari 5 (empat) kegiatan yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2021 BPKH Wilayah XXI Palangka Raya seperti pada Tabel 3. berikut:

Tabel 3. Perjanjian Kinerja Tahun 2021 BPKH Wilayah XXI Palangka Raya

Kode	Kegiatan / KRO / RO	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
5436	Pencegahan dampak lingkungan	Dokumen hasil verifikasi lapangan kawasan dengan indeks jasa lingkungan tinggi secara partisipatif di wilayah kerja BPKH	
5436.QMA	Data dan informasi publik	Penyediaan data dan informasi geospasial kawasan dengan indeks jasa lingkungan tinggi terlayani	1 Layanan
5436.QMA.007	Dokumen hasil verifikasi lapangan kawasan dengan indeks jasa lingkungan tinggi secara partisipatif di wilayah BPKH (PEN)	Penyediaan data dan informasi hasil verifikasi lapangan kawasan dengan indeks jasa lingkungan tinggi secara partisipatif di wilayah kerja BPKH terlayani (PEN)	1 Layanan
5433	Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan	Panjang batas kawasan hutan yang telah diselesaikan hak-hak pihak ketiga;	

		Dokumen hasil inventarisasi, verifikasi dan BATB obyek TORA dalam kawasan hutan di wilayah kerja BPKH	
5433.PBV	Kebijakan bidang kehutanan	01 Rekomendasi kebijakan atas pelaksanaan inventarisasi, verifikasi dan penataan batas obyek TORA dalam kawasan hutan di wilayah kerja BPKH diterbitkan; 02 Rekomendasi kebijakan atas pelaksanaan penataan batas kawasan hutan diterbitkan	4 Rekomendasi kebijakan
5433.PBV.002	Panjang batas kawasan hutan yang telah diselesaikan	Rekomendasai kebijakan atas pelaksanaan penataan batas kawasan hutan diterbitkan	1 Rekomendasai kebijakan
5433.PBV.007	Panjang batas kawasan hutan yang telah diselesaikan (PEN)	Rekomendasi kebijakan atas pelaksanaan penataan batas kawasan hutan diterbitkan / ketahanan pangan (PEN)	Rekomendasi kebijakan
5433.PBV.008	Panjang batas kawasan hutan yang telah diselesaikan (PEN)	Rekomendasai kebijakan atas pelaksanaan penataan batas kawasan hutan diterbitkan (PEN)	1 Rekomendasi kebijakan
5433.PBV.009	Inventarisasi, verifikasi dan BATB obyek TORA dalam kawasan hutan	Rekomendasi kebijakan atas pelaksanaan Inventarisasi, verifikasi dan	1 Rekomendasi kebijakan

	(PEN)	penataan batas obyek TORA dalam kawasan hutan di wilayah kerja BPKH diterbitkan (PEN)	
5434	Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan	Data dan informasi sumber daya hutan hasil inventarisasi hutan nasional di wilayah kerja BPKH; Data dan informasi pemantauan SDH di wilayah kerja BPKH.	
5434.BMA	Data dan informasi publik	Penyediaan informasi dan dokumentasi pengukuhan dan penatagunaan kawasan hutan terlayani	6 Layanan
5434.BMA.002	Data dan informasi sumber daya hutan di wilayah kerja BPKH	Penyediaan data dan informasi sumber daya hutan di wilayah kerja BPKH terlayani	5 Layanan
5434.BMA.003	Data dan informasi pemantauan SDH di wilayah kerja BPKH	Penyediaan data dan informasi pemantauan SDH di wilayah kerja BPKH terlayani	1 Layanan
5435	Perencanaan kawasan hutan	Hasil Verifikasi PNPB penggunaan kawasan hutan di wilayah kerja BPKH	
5435.BAC	Pelayanan publik kepada badan usaha	Hasil Verifikasi PNPB penggunaan kawasan hutan di wilayah kerja BPKH	19 Badan usaha
5435.BAC.001	Hasil Verifikasi PNPB	Pelaksanaan Verifikasi PNPB	19 Badan

	Penggunaan Kawasan Hutan di wilayah kerja BPKH	Penggunaan kawasan hutan di wilayah kerja BPKH terlaksana	usaha
5432	Dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan	01 Nilai Sakip Ditjen PKTL; 02 Level Maturitas SPIP Ditjen PKTL; 03 Laporan keuangan Ditjen PKTL yang tertib dan akuntabel	
5432.EAA	Layanan Perkantoran	Layanan perkantoran terlaksana	1 Layanan
5432.EAA.001	Layanan Perkantoran	Layanan perkantoran terlaksana	1 Layanan
5432.EAC	Layanan Umum	Layanan dukungan manajemen	1 Layanan
5432.EAC.970	Layanan dukungan manajemen satker	Layanan dukungan manajemen satker terlaksana	1 Layanan
5432.EAD	Layanan sarana internal	Layanan sarana internal terlaksana	203 Unit
5432.EAD.001	Layanan Sarana Internal	Layanan saran internal terlaksana	203 Unit

Perjanjian Kinerja Tahun 2021 BPKH Wilayah XXI Palangka Raya telah dilaksanakan dengan hasil capaian yang lebih baik, seperti yang ada pada :

Tabel 4. Target dan Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2021

Kegiatan / KRO / RO	Indikator Kinerja	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
Pencegahan dampak lingkungan	Dokumen hasil verifikasi lapangan kawasan dengan indeks jasa lingkungan tinggi secara partisipatif di wilayah kerja BPKH	1.167.000.000-	1.166.713.000	99,98
Panjang batas kawasan hutan yang telah diselesaikan (PEN)	Rekomendasai kebijakan atas pelaksanaan penataan batas kawasan hutan diterbitkan	26.950.294.000	26.944.191.875	99,98
Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan	Data dan informasi sumber daya hutan hasil inventarisasi hutan nasional di wilayah kerja BPKH; Data dan informasi pemantauan	397.678.000	397.635.100	99,99

	SDH di wilayah kerja BPKH.			
Perencanaan kawasan hutan	Hasil Verifikasi PNPB penggunaan kawasan hutan di wilayah kerja BPKH	503.396.000	503.184.193	99,96
Layanan Perkantoran	Layanan perkantoran terlaksana	5.339.268.000	5.303.339.297	99,32
Layanan Umum	Layanan dukungan manajemen	410.390.000	410.047.690	99,92
Layanan sarana internal	Layanan sarana internal terlaksana	1.015.000.000	1.014.743.000	99,97

Adapun progres realisasi capaian kinerja pada Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XXI Palangka Raya dengan tahun sebelumnya terdapat peningkatan persentase capaian kinerja sebagaimana dapat dilihat perbandingannya pada Tabel 5. berikut:

Tabel 5. Perbandingan Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun 2021, 2020, 2019, Tahun 2018, Tahun 2017.

Program	Sasaran	Tingkat Capaian Kinerja							
		2017		2018		2019		2020	
		Keu %	Fisik %	Keu %	Fisik %	Keu %	Fisik %	Keu %	Fisik %
Planologi dan Tata Lingkungan	Terlaksananya penataan batas kawasan hutan sepanjang 40.000 km dan terbangunnya kesepahaman publik serta pengendalian	98,95	100	38,20	100	99,45	100	96,79	100

	pemantapan kawasan hutan								
Planologi dan Tata Lingkungan	Pemantapan Kawasan Hutan	96,88	100	38,20	100	99,45	100	96,79	100

Program	Sasaran	Tingkat Capaian Kinerja							
		2021		-		-		-	
		Keu %	Fisik %						
Kualitas Lingkungan Hidup : Pencegahan dampak lingkungan	Dokumen hasil verifikasi lapangan kawasan dengan indeks jasa lingkungan tinggi secara partisipatif di wilayah kerja BPKH	99,88	100						
Program Pengelolaan Hutan Berkelanjutan:									
1. Penguatan dan penatagunaan kawasan hutan;	1. Panjang batas kawasan hutan yang telah diselesaikan hak-hak pihak ketiga; 2. Dokumen hasil inventarisasi, verifikasi dan BATB obyek TORA dalam kawasan hutan di wilayah kerja BPKH.								
2. Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan;	1. Data dan informasi sumber daya hutan hasil inventarisasi hutan nasional di wilayah kerja BPKH; 2. Data dan informasi pemantauan SDH di wilayah kerja BPKH								
3. Perencanaan Kawasan Hutan	Hasil Verifikasi PNBK Penggunaan Kawasan Hutan di wilayah kerja BPKH								
Program Dukungan Manajemen : Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan	01. Nilai SAKIP Ditjen PKTL; 02. Level Maturitas SPIP Ditjen PKTL; 03. Laporan Keuangan Ditjen PKTL yang Tertib dan Akuntabel.								

A. Realisasi Anggaran

Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XXI Palangka Raya selaku unit pelaksana teknis Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan yang mengemban tugas melaksanakan Program Kualitas Lingkungan Hidup di wilayah Provinsi Kalimantan Tengah. Pelaksanaan kinerja BPKH Wilayah XXI Palangka Raya melalui kegiatan DIPA Tahun 2021 dialokasikan anggaran sebesar **Rp. 35.783.026.000,-** (*Tiga Puluh Lima Milyar Tujuh Ratus Delapan Puluh Tiga Juta Dua Puluh Enam Ribu Rupiah*). Hasil capaian kinerja Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XXI Palangka Raya Tahun Anggaran 2021 sampai dengan 31 Desember 2021 terealisasi sebesar **Rp. 35.739.804.265,-** (*Tiga Puluh Lima Milyar Tujuh Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Enam Ratus Tiga Belas Ribu Empat Ratus Empat Puluh Dua Rupiah*) atau penyerapan keuangan sebesar **99,88 %** dengan fisik sebesar 100%.

IV. PENUTUP

Secara umum pencapaian kinerja kegiatan program Planologi dan Tata Lingkungan Tahun 2021 pada BPKH Wilayah XXI Palangka Raya **Sangat Baik Sekali**. Hal ini ditandai dengan terealisasinya kegiatan program Planologi dan Tata Lingkungan Tahun 2021 sebesar **99,88 %** Namun demikian prestasi ini masih harus perlu dipertahankan atau terus ditingkatkan untuk pencapaian keberhasilan program dengan tujuan yang tepat sasaran yang berpedoman pada Renstra Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Tahun 2020-2024.

Persentase pencapaian kinerja kegiatan program Planologi dan Tata Lingkungan Tahun 2021 pada BPKH Wilayah XXI Palangka Raya, dari sumber anggaran tersedia dalam DIPA BPKH Wilayah XXI Palangka Raya Tahun 2021, yakni:

1. Program Planologi dan Tata Lingkungan Tahun 2021, sebesar **Rp. 35.783.026.000,-** (*Tiga Puluh Lima Milyar Tujuh Ratus Delapan Puluh Tiga Juta Dua Puluh Enam Ribu Rupiah*).
2. Pencapaian kinerja kegiatan sampai dengan 31 Desember 2021 dengan realisasi sebesar **35.739.804.265,-** (*Tiga Puluh Lima Milyar Tujuh Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Enam Ratus Tiga Belas Ribu Empat Ratus Empat Puluh Dua Rupiah*),- atau penyerapan keuangan sebesar **99,88 %**